

## BAB II

### DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN

#### A. Profil Kabupaten Bantul

##### 1. Sejarah Kaputen Bantul

Bantul memang tak bisa dilepaskan dari sejarah Yogyakarta sebagai kota perjuangan dan sejarah perjuangan Indonesia pada umumnya. Bantul menyimpan banyak kisah kepahlawanan. Antara lain, perlawanan Pangeran Mangkubumi di Ambar Ketawang dan upaya pertahanan Sultan Agung di Pleret. Perjuangan Pangeran Diponegoro di Selarong. Kisah perjuangan pioner penerbangan Indonesia yaitu AdiSucipto, pesawat yang ditumpangnya jatuh ditembak Belanda di Desa Ngoto. Tolak awal pembentukan wilayah Kabupaten Bantul adalah perjuangan gigih Pangeran Diponegoro melawan penjajah bermarkas di Selarong sejak tahun 1825 hingga 1830. Seusai meredam perjuangan Diponegoro, Pemerintah Hindia Belanda kemudian membentuk komisi khusus untuk menangani daerah Vortenlanden yang antara lain bertugas menangani pemerintahan daerah Mataram, Pajang, Sokawati, dan Gunung Kidul. Kontrak kasunanan Surakarta dengan Yogyakarta dilakukan baik hal pembagian wilayah maupun pembayaran ongkos perang, penyerahan pemimpin pemberontak, dan pembentukan wilayah administratif. Pemerintah Hindia Belanda dan sultan Yogyakarta pada tanggal 26 dan 31 Maret 1831 mengadakan kontrak kerja sama tentang pembagian wilayah

administratif baru dalam kasultanan disertai penetapan jabatan kepala wilayahnya. Saat itu Kasultanan Yogyakarta dibagi menjadi tiga katupaten yaitu BantulKarang untuk kawasan selatan, Deggung untuk kawasan utara, dan Kalasan untuk kawasan timur. Menindaklanjuti pembagian wilayah baru Kasultanan Yogyakarta, tanggal 20 Juli 1831 atau Rabu Kliwon 10 Sapar tahun Dal 1759 (Jawa) secara resmi ditetapkan pembentukan Kabupaten Bantul yang sebelumnya dikenal bernama Bantulkarang tersebut di atas. Seorang nayaka Kasultanan Yogyakarta bernama Raden Tumenggung Mangun Negoro kemudian dipercaya Sri Sultan Hamengkubuwono V untuk memangku jabatan sebagai bupati Bantul yang pertama.

Sampai saat ini kepemimpinan kepala daerah di Bantul sudah masuk periode ke-26. Dengan sejarah panjang kepemimpinan daerah di Bantul, sangat perlu di dokumentasikan secara tertulis kedalam sebuah direktori atau profil kepemimpinan Bupati Bantul sejak awal berdiri hingga saat ini. Buku direktori atau profil Bupati Bantul dari masa ke masa sangat penting disusun terutama sebagai media informasi bagi generasi muda di Bantul pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya untuk mengetahui sejarah kepemimpinan dan prestasi-prestasi yang berhasil ditorehkan dar masa kepemimpinan Bupati Bantul terdahulu.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Sumber data dari hasil penelitian PT. Sinegi Visi Utama

## 2. Kondisi Geografis Kabupaten Bantul

### a. Letak Wilayah

Kabupaten Bantul terletak antara  $07^{\circ} 44' 04''$  –  $08^{\circ} 00' 27''$  Lintang Selatan dan  $110^{\circ} 12' 34''$  –  $110^{\circ} 31' 08''$  Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Bantul 508,85 Km<sup>2</sup> (15,90 5 dari Luas wilayah Provinsi DIY) dengan topografi sebagai dataran rendah 140% dan lebih dari separonya (60%) daerah perbukitan yang kurang subur, secara garis besar terdiri dari: Bagian Barat, adalah daerah landai yang kurang serta perbukitan yang membujur dari Utara ke Selatan seluas 89,86 km<sup>2</sup> (17,73 % dari seluruh wilayah). Bagian Tengah, adalah daerah datar dan landai merupakan daerah pertanian yang subur seluas 210.94 km<sup>2</sup> (41, 62 %).

Bagian Timur, adalah daerah yang landai, miring dan terjal yang keadaannya masih lebih baik dari daerah bagian Barat, seluas 206,05 km<sup>2</sup> (40,65%). Bagian Selatan, adalah sebenarnya merupakan bagian dari daerah bagian Tengah dengan keadaan alamnya yang berpasir dan sedikit berlaguna, terbentang di Pantai Selatan dari Kecamatan Srandakan, Sanden dan Kretek.<sup>41</sup>

Kabupaten bantul berbatasan dengan dengan beberapa kabupaten dan kota yaitu:

- 1) Pada bagian utara kabupaten Bantul berbatasan dengan kota yogyakarta dan kabupaten sleman

---

<sup>41</sup> Ibid

- 2) Pada bagian timur kabupaten bantul berbatasan dengan gunung kidul dan kabupaten sleman
- 3) Pada bagian selatan Kabupaten bantul berbatasan dengan samudra Hindia
- 4) Dan pada bagian barat Kabupaten Bantul berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo.

## **B. Profil Pedagang Kaki Lima**

### **1. Gambaran Umum Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Bantul**

Berdasarkan data pedangan kaki lima tahun 2013 kabupaten bantul tersebar di beberapa titik kecamatan dan wilayah kota kabupaten Bantul yaitu:

- a. Wilayah sanden: pada wilayah ini pedagang kaki lima tersebar di sekitaran Ruas Jalan sanden, Jl raya depan Kecamatan, Sepanjang Jln sanden – Sorobayan, Jl. Samas, Jln. Samas selatan pasar Celep.
- b. Wilayah Sewon: terletak di Jl. Paris Km 5 sewon, Jl. Paris Samsat, Jl. Paris km 4,5, Jl. Paris depan perum Salakan, Jl. Paris depan perum perwita, Dongkelan Rt. 3, Jl. Paris km 3,5 salakan (Ruas jalan), Jl. Imogiri Barat km 5 wojo, Karang gede, Jl. Paris km 7 Cabeyan.
- c. Wilayah Piyungan : terletak SDKarangploso, Pasar Wage, Polsek Piyungan, BPD Piyungan, Puskesmas, Polsek Piyungan, Pasar Piyungan, Jl Yogyakarta – Wonosari,
- d. Wilayah Sedayu : Terletak di SMP Bakal, Salak, Sadayu, Jln Wates

Km 14, Klagon Temple, Depan Kantor Pos, Pinggir jalan depan Kecamatan sedayu, argosari Gayam, dan lain-lain.

- e. Wilayah Bantul: terletak di Alun-alun Bantul Paseban Timur, Trotoar, Depan ASKES, Ruas jalan sepanjang, selatan jalan dan sekitar lapangan Ringunharjo.
- f. Wilayah Dlingo : Terletak di ruas jalan, Jl Patuk sampai Dlingo, Jl Temuwuh Playen, Timur kecamatan Dlingo, tepi jalan, Jl Mts Maarif, Jl Kapingan sampai Dodogan, Jl sawah lawang.
- g. Wilayah Banguntapan : terletak di ruas jalan BD Tamanan, Ringroad selatan, Kelurahan Maju terus, PPLS, Jl Karangturi, Ringroad, Jl. Monument AU 108.
- h. Wilayah Pundong: terletak di sekitaran jalan samas, kios pasar, Kelurahan Pjrejo, Jalan Ke kecamatan Pundong.
- i. Wilayah Pleret : Terletak disekitar Jl pasar pleret, Jl. Imogiri, Jl. Raya Pleret, Kelurahan Pleret, Pinggir Jlan wonokromo, Pinggir jalan kampong, Jl pleret – segoroyoso, Pleret kotagede,perempatan pleret, sepanjang trotoar, Kedaton Timur dan jalan raya Pleret.
- j. Wilayah Jetis : terletak di Canden, Barongan, SD sawahan, Jl. Barongam, Jl. Paris Km 13 Bakulan, Patalan, Ngupit, Trimulyo, Bulus wetan.
- k. Wilayah Srandakan : Terletak di sekitar Poncosari, Sambeng II, Poncosari (godegan), Mangiran, Kedung Bule, Gangsaren, Pondok, Tegal Layang, Jl. Srandakan, Gangsaren Kidul Trimurti.

- l. Wilayah Kretek : Terletak di sekitar wilayah Jl. Paris km 22, Pasar Ngangruksari, TPI Depok, Parkiran barat, Depok pantai, Parangtritis, Parangkuscmu, sepanjang ruas jalan Kretek, Terminal parangtritis baru, Jl. Parangtritis km 21,5, Pasar Ngangkruk, Parangtritis Mancingan XI, Pinggir pantai, Relokasi barat.
- m. Wilayah Bambanglipuro : Terletak di sekitar Ruas jalan Bambanglipuro, Selo, Jl.Samas, Jl. Samas km 18, Masjid Nurul Huda, dan Jl. Samas km 19,5.
- n. Wilayah Imogiri: Terletak di sekitar Jl. Imogiri km 13, Jl. Silok, ruas jalan imogiri, SD 3 Imogiri.
- o. Wilayah Pandak: Terletak di sekitar ruas jalan Pandak, Depan PT. Samudra, Klisat, Depan Kelurahan Caturharjo, Pasar Gumulan.
- p. Wilayah Kasihan : Terletak di sekitar Jalan IKIP PGRI, Jalan Soboman, Barat Madukosmo, Depan Kios Desa, Jalan Sonosewu, Jalan Nitipuran, jalan Bantul, Jalan Bantul km 5, Utara Kalimasada, jembatan winongo, dan jalan karangjati.

**Tabel 2.1. Data Pedangan Kaki Lima Kabupaten Bantul**

No	Kecamatan	Jumlah PKL
1	Sewon	150
2	Pajangan	18
3	Piyungan	45
4	Sedayu	55
5	Bantul	91
6	Dlingo	90
7	Banguntapan	77
8	Pundong	73
9	Pleret	96
10	Jetis	75
11	Sanden	115
12	Srandakan	54
13	Kretek	404
14	Bambanglipuro	46
15	Imogiri	68
17	Pandak	62
18	Kasih	62
	Jumlah	1.541

Sumber: Data PKL Tahun 2013 Kabupaten Bantul

## 2. Jenis Dagangan

Berdasarkan data rekapitulasi pedagang kaki lima tahun 2013, pedagang kaki lima di Kabupaten Bantul terkategori menjadi 2 kategori yaitu: Kuliner dan non-kuliner. Dagangan kuliner tersebut terdiri dari: Warung makan, pedagang buah, penjual jamu, angkringan, pedagang es/ minuman, warung, burger mini, makanan gerobak (bakso, bakwan kawi, dan siomay), dan dagangan yang non-kuliner terdiri dari: bengkel, sol sepatu, ternak ayam, elpiji/gas, Tambal ban, Bekleding, laundry, arang atok, pakalan, dagang mainan, jasa plat nomor, tukang duplikat kunci, reklame, pedagang koran, jasa angkut, jasa stemple, konter pulsa, pedagang rak buku, pedangan burung, gilingan, potong rambut, penjahit, seles, klitikan, barber, pedagan pakaian, pedagang rokok, dan klontong.

### 3. Sarana Fisik

Dalam konsep teori pedagang kaki lima Waworoentoe (Widjajanti, 2000) sarana fisik pedagang kaki lima di kelompokkan menjadi lima: 1) kios, 2) Warung semi permanen, 3) Gerobak/ kereta dorong, 4) meja/ Jongkok. 5) Gelaran/alas, dan 6) Pikulan atau keranjang. Berdasarkan data PKL 2013 sarana fisik yang digunakan pedagang-kaki lima Kabupaten Bantul terdiri atas:

- a. Warung semi permanen (bongkar pasang) seperti tenda angkringan, tenda warung kuliner (sate, lamongan, dan warung makan lainnya), jasa duplikat kunci, jasa plat, penjual pukis.
- b. Kios: warung kelontong, Bengkel
- c. Gerobak/ Kereta dorong: Pedagang Batagor, Pedagang minuman (es/ jus), pedagang roti bakar,
- d. Meja/Jongkok: Pedagang ayam, pedangan minuman khas daerah (dawet ayu), pedangan jajanan pasar, jasa sol sepatu, pedagang pulsa.
- e. Pikulan/ Keranjang: pedagang gorengan,
- f. Gelaran alas:

**Tabel 2.2. Sarana Fisik Pedagang Kaki Lima Kab. Bantul**

Sarana Fisik	Jenis Usaha	
	Non -Jasa	Jasa
Semi permanen	- Angkringan - Warung Kuliner - Pedagang Pukis	- Duplikat Kunci - Jasa tambal ban - Jasa Plat
Kios	- Kelontong - Kios bensin - Pedagang Buag	- Bengkel
Gerobak/Kereta	- Pedangan sate - Pedangan Roti - Pedangan	

Sarana Fisik	Jenis Usaha	
	Non –Jasa	Jasa
	Minuman es - Pedagang jenis gorengan -	
Meja/Jongkok	- Pedangan ayam - Jajanan Pasar	- Jasa sol sepatu - Penjual pulsa
Pikulan/Keranjang	- Pedagang Gorengan -	-
Gelaran alas	-	-

Selain terbagi kedalam jenis sarana fisik, pedagang kaki lima terbagi kedalam fungsi dan waktu pelayanan, berdasarkan hasil pengamatan pra-penelitian, fungsi pedagang kaki lima terbagi kedalam rekreasi dan perdagangan/jasa. Pedagang kaki lima yang fungsinya kedalam rekreasi biasanya banyak terdapat di tempat hiburan seperti, pasar malam, wilayah pantai sedangkan pedagang kaki lima yang fungsinya perdagangan/jasa banyak terdapat di sepanjang ruas jalan Kabupaten Bantul

#### 4. Organisasi Pedagang Kaki Lima

Dalam Perda Nomor 07 tahun 2014 organisasi yang dimaksud adalah Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia yang selanjutnya disingkat APKLI adalah sebuah organisasi profesi dan gerakan sosial ekonomi yang bersifat independen, yang tidak terikat dan atau mengikatkan diri dengan organisasi sosial politik atau kekuatan politik lainnya, mandiri, yang dalam kegiatannya bersifat nirlaba.

Organisasi asosiasi ini merupakan wadah untuk bermusyawarah

bagi pedagang kaki lima untuk menyampaikan aspirasi keluhan mereka baik terakit permasalahan internal maupun permasalahan eksternal. Organisasi ini terdiri dari dua yaitu DPD APKLI daerah dan DPC APKLI. DPD APKLI adalah asosiasi pedagan kaki lima yang berada di tingkat daerah yang menaungi DPC APKLI. Dan DPC APKLI adalah organisasi asosiasi pedagang kaki lima yang berada di wilayah kecamatan yang berhubungan langsung dengan pedagang kaki lima. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Hendri Hartanti Kepala Seksi Sarana dan Usaha Perdagangan Kabupaten Bantul.

*“Dalam penataan ini kami punya mitra, namanya asosiasi pedagang kaki lima DPD APKLI Bantul, jadi DPD APKLI ini untuk tingkat kabupaten, kalau DPC tingkatnya kecamatan dan semua sudah ada”.*

APKLI tersebut di bentuk sebagai mitra dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dalam pelaksanaan penataan pedangan kaki lima. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Bapak Eko selaku Ketua APKLI DPD Kabupaten Bantul dalam wawancara iya mengatakan:

*“Jadi APKLI DPD ini dibentuk pada tanggal 12 Juni 2011, dan alhamdulillah keadaaan APKLI sangat direspon baik oleh Pemerintah Kabupaten Bantul. Setelah itu barulah Pemerintah Kabupaten Bantul dan APKLI DPD membentuk APKLI di kecamatan. APKLI kecamatan ini terbentuk setahun setelah APKLI DPD dalam binaan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi yaitu tepatnya pada bulan Agustus 2012. Tujuan dari didirikannya APKLI itu sendiri sebenarnya adalah sebagai lembaga yang menjembatani kepentingan dan wadah pemersatu bagi para pedagang kaki lima. Karena tanpa adanya APKLI PKL tidak adakan bisa berbuat apa-apa”.*

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa APKLI adalah sebagai salah satu lembaga yang menjembatani kepentingan

pedagang kaki lima serta sebagai wadah pemersatu para pedagang kaki lima.

#### **5. Landasan Hukum Pemberdayaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima**

Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dimaksud dengan Peraturan Daerah (Perda) adalah “peraturan erundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah”.

Dalam ketentuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah Propinsi / Kabupaten / Kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.<sup>42</sup>

Sesuai ketentuan Pasal 12 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, materi muatan Perda adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dalam pemberdayaan dan penataan pedagang kaki lima, Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi memiliki landasan hukum

---

<sup>42</sup>Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 41 tahun 2012. Dalam Permendagri tersebut dijabarkan tujuan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima antara lain: ~~se~~ —

- a. Memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya;
- b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri; dan
- c. Untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

Selain itu permendagri nomor 41 tahun 2012, Pemerintah Kabupaten Bantul juga mempunyai Peraturan Daerah nomor 07 tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan kaki lima sebagai penjabaran lebih lanjut tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.